



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL	Tanggal Terbit 7-1-2025		Halaman 1/1
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi publik adalah melakukan pengujian terhadap jenis informasi publik yang dikecualikan yang dilakukan dengan teliti mengacu kepada aturan hukum yang ada.		
TUJUAN	Menetapkan hasil kajian terhadap jenis informasi publik yang dikecualikan		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPeraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa InformasiPP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kajian atas daftar informasi dan dokumen publik yang terdapat dalam DIP Dinas Perindustrian Provinsi NTBMemberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTBMenyampaikan kepada atasan PPID, atas status informasi/dokumen yang diminta permohonan, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID meminta kepada pimpinan SKPD untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon atas dasar surat pengesahan dari PPID utamaPPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB menyampaikan hasil telah dokumen/informasi publik kepada PPID UtamaPPID Utama membuat surat pengesahan informasi/dokumen publik yang dikecualikan. Kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB atau membuat jawaban surat terhadap permohonan pemohon informasi yang masuk katagori yang dikecualikan yang akan ditandatangani oleh atasan PPID		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">Komisi Informasi Provinsi NTBPPID Utama Provinsi NTBPPID Provinsi NTBBidang/bagian/installasi terkait di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi NTB		

